



## Klaim Tidak Ada Intervensi

**JOKO** Agus Setyono menjabat selama kurang lebih setahun sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar. Dengan masa jabatan yang terbilang cukup singkat. Dirinya merasa hal tersebut normal saja terjadi dan tidak ada masalah. Dirinya mengatakan bahwa memang di BPK tidak ada batasan berapa lama masa jabatan tersebut.

"Tidak ada unsur politis dan tidak ada persetujuan dalam hal ini. Nanti BPK yang baru akan melengkapi dan menambah apa yang sudah dilakukan di tahun 2018-2019," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa setiap bekerja ada aturannya dan tidak boleh membawa emosi dalam pekerjaan.

"Jika pada kenyataan seperti itu yang kita lihat di lapangan kemudian kita rekomendasikan itu yang harus dijalankan pemda. BPK

harus menjadi teladan bagi semua tidak malah ikut campur dalam pelaksanaan anggaran tapi kita melihat apakah sudah sesuai ketentuan yang ada," jelasnya.

Apabila ada hal yang perlu direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan dan tidak boleh ada intervensi. Ia mengaku selama masa jabatannya sebagai kepala Perwakilan BPK RI Kalbar tidak ada intervensi dan berjalan independen dan memang sudah menjadi moto dan harus berjalan sesuai aturan.

"Sebelumnya Pemprov sudah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Saya berkeinginan apa yang sudah terjadi di tahun lalu tidak terjadi lagi ditahun ini dan bisa kembali menjadi WTP," harapnya. **(ang)**